

***The Preparation Model of Standard Expenditure Analysis for Kudus district in Supporting Planning, Budgeting, and Supervision Of Revenue and Expenditure Budget (APBD)***

**Model Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Kudus Dalam Menunjang Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan APBD**

Siti Sumiati<sup>1</sup>, Hani Werdi Apriyanti<sup>2</sup>, Khoirul Fuad<sup>3</sup>

[siti.sumiati@unissula.ac.id](mailto:siti.sumiati@unissula.ac.id), [hani.apriyanti@unissula.ac.id](mailto:hani.apriyanti@unissula.ac.id), [Khoirul.fuad@unissula.ac.id](mailto:Khoirul.fuad@unissula.ac.id)  
Universitas Islam Sultan Agung

Received : Agustus 2021, Revised : Agustus 2021, Accepted : September 2021

**ABSTRACT**

Local governments need to develop a Standard Expenditure Analysis (ASB) system as mandated in laws and regulations in order to create an effective and efficient budget. It is very important for local governments to provide clarity in determining the time unit and number of units used in activities so that there is uniformity so that the preparation of the Standard Expenditure Analysis is more precise. The basis for preparing the Standard Expenditure Analysis (ASB) should not only look at one year in order to obtain a better ASB model in predicting total expenditure. This study develops an ASB model that can be used by the Kudus Regency Government

**Keywords :** *Standard Expenditure Analysis, Budgeting, Kudus*

**ABSTRAK**

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya anggaran yang efektif dan efisien. Sangat Penting bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan ketegasan dalam menentukan satuan waktu dan jumlah unit yang digunakan dalam kegiatan agar ada keseragaman sehingga dalam penyusunan Analisis Standar Belanja lebih tepat. Dasar penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) sebaiknya tidak hanya melihat waktu satu tahun saja agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanja. Penelitian ini mengembangkan model ASB yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

**Kata kunci:** ASB; Penganggaran, Kabupaten Kudus

## **1. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja yang disusun oleh pemerintah daerah harus didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah harus memiliki perencanaan strategik yang disusun secara objektif dan melibatkan seluruh komponen terkait yang ada di dalam pemerintahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjalankan system tersebut yaitu dengan menentukan standar harga, tolok ukur kinerja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu aspek yang

diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (Kawedar dkk, 2009). Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dari penganggaran sector public, disamping beberapa fungsi utama lainnya seperti sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi dan alat menciptakan ruang public (Madiasmo, 2009).

Pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar agar mampu memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat. Hal itu dapat diwujudkan dengan pelaksanaan yang efektif dan efisiensi yang dimulai dari perencanaan, penganggaran sampai pada pelaporan keuangan daerah. Salah satu upaya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yaitu dengan melakukan penganggaran berbasis kinerja. Instrument yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja salah satunya yaitu dengan Analisis Standar Belanja (ASB).

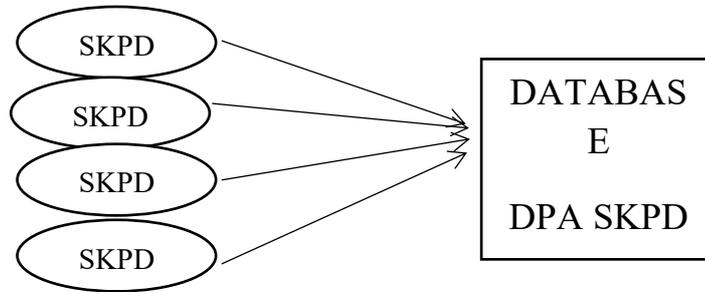
ASB sudah dikenal jauh di pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Peratnggungjawaban Keuangan Daerah. Asal tersebut nampaknya merupakan terjemahan dari pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagai bentuk upaya menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Peraturan mengenai ASB (Analisis Standar Belanja) merupakan sebuah instrument untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. ASB kembali diperkenalkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, salah satunya memberikan panduan agar perencanaan anggaran belanja dapat berjalan efektif dan efisien mewujudkan tujuan pembangunan. Pasal 157 menjelaskan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, memuat dokumen analisa standar belanja sebagai salah satu lampiran pendukung. Hal ini dimaknai bahwa penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja salah satu didasarkan pada ASB, yang merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.

Oleh karena itu, Studi Perhitungan Analisis Standar Belanja pada setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kudus yang sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 adalah hal yang harus dilaksanakan sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan, akuntabel, dan professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

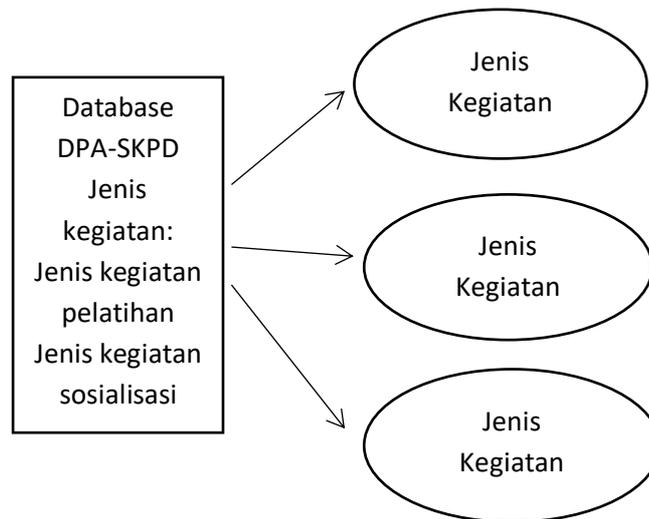
## 2. Metode Penelitian

Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variansi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pengendali belanja (*Cost Driver*). Pengendali belanja (*Cost Driver*) tiap kegiatan dalam penyusunan model Analisis Standar Biaya (ASB) ini bisa berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Sedangkan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi (Y) adalah Total Belanja (*Total Cost*) dari suatu jenis kegiatan.

Suatu persamaan regresi yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu ( $Y = a + bX$ ) dengan menggunakan Pendekatan Regresi Sederhana (*Ordinary Least Square*). Dimana (a) merupakan satuan pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) dari jenis kegiatan dan (b) yaitu satuan pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*). Persamaan regresi ini merupakan salah satu komponen yang akan terdapat dalam model Analisis Standar Biaya (ASB) sebagai rumus perhitungan untuk menilai kewajaran suatu program/kegiatan yang sejenis dengan masing-masing model Analisis Standar Belanja (ASB).



**Gambar 1 Tahap Pengumpulan Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).**



**Gambar 2 Tahap Penyetaraan Jenis kegiatan**

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 yang ada kegiatan Bimbingan Teknik/Pelatihan, kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan, serta kegiatan Workshop/Diklat yaitu sebanyak 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Adapun daftar 6 SKPD yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar SKPD yang Menjadi Objek Penelitian**

Nomor	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
1.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3.	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
6.	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2020

Pada tahap penyetaraan kegiatan ini diperoleh 22 kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan, 10 kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan, serta 7 kegiatan Workshop/Diklat. Data yang diperoleh ini sudah disortir dan dilakukan pemilahan data untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data lanjutan.

**Tabel 2. Rincian Biaya Kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan**

No.	Program/Kegiatan	Cost Driver		Output (OH)	Total Anggaran (Rp.)
		Orang	Hari		
1.	Pelatihan Kejuruan Komputer Akuntansi IN	16	18	288	21.266.000
2.	Pelatihan Kejuruan Teknisi HP IN	16	12	192	19.055.423
3.	Pelatihan Kejuruan Tata Boga Lanjutan IN	16	6	96	15.916.000
4.	Pelatihan Kejuruan Otomotif Sepeda Motor Lanjutan IN	16	24	384	28.941.000
5.	Pelatihan Kejuruan Baki Lamaran MTU	16	6	96	13.916.000
6.	Pelatihan Kejuruan Tata Kecantikan Kulit MTU	16	12	192	20.591.000
7.	Pelatihan Kejuruan Tata Rias Pengantin Lanjutan IN	16	12	192	19.266.000
8.	Pelatihan Kejuruan Tata Kecantikan Kulit IN	16	12	192	20.591.000
9.	Pelatihan Kejuruan Desain Grafis Lanjutan IN	16	18	288	19.266.000
10.	Pelatihan Kejuruan Web Desain IN	16	24	384	25.941.000
11.	Pelatihan Kejuruan Desain Gambar Teknis 2D dan 3D IN	16	24	384	25.941.000
12.	Pelatihan Kejuruan Operator Komputer Lanjutan IN	16	24	384	25.941.000
13.	Pelatihan Kejuruan Operator Komputer MTU	16	24	384	25.941.000
14.	Pelatihan Kejuruan Tata Boga IN	16	6	96	13.916.000
15.	Pelatihan Kejuruan Listrik dan Pendingin IN	16	12	192	20.591.000
16.	Pelatihan Kejuruan Menjahit Busana MTU	16	24	384	25.941.000
17.	Pelatihan Kejuruan Menjahit Busana Lanjutan IN	16	24	384	25.941.000
18.	Pelatihan Kejuruan Tata Kecantikan Rambut MTU	16	18	288	23.266.000
19.	Pelatihan Kejuruan Tata Kecantikan Rambut Lanjutan IN	16	18	288	23.266.000
20.	Pelatihan Kejuruan Tata Boga MTU	16	6	96	13.916.000
21.	Pelatihan Kejuruan Tata Rias Pengantin MTU	16	12	192	20.591.000
22.	Pelatihan Kejuruan Pertukangan Kayu MTU	16	24	384	30.541.000

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2020

Suatu formula belanja/model Analisis Standar Belanja sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 12.516.962 + 34.054X$$

Hasil penghitungan data tersebut dengan menggunakan asumsi bahwa standar anggaran yang digunakan per 1 paket kegiatan pelatihan. Hal itu dikarenakan data yang digunakan dalam uji ini hanya pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.

**Tabel 3 Rincian Biaya Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan**

No.	Program/Kegiatan	Cost Driver		Output (OH)	Total Anggaran (Rp.)
		Orang	Hari		
1.	Sosialisasi FGD 1 FEDEP	65	1	65	8.525.000
2.	Sosialisasi FGD 2 FEDEP	65	1	65	8.525.000
3.	Sosialisasi FGD 3 FEDEP	65	1	65	7.475.000
4.	Konsultasi Publik	80	2	160	27.090.000
5.	Sosialisasi Penanggulangan Gangguan Akibat Yodium (GAKY)	200	1	200	12.800.000
6.	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	25	1	25	38.364.000
7.	Sosialisasi Pengelolaan BMD dan Pelatihan Aplikasi SIMDA BMD	55	2	110	14.129.000
8.	Sosialisasi Pendataan PBB-P2	95	2	190	48.756.000
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	200	1	200	43.200.000
10.	Sosialisasi Cukai	50	1	50	25.784.000

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2020

Suatu formula belanja/model Analisis Standar Belanja sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 13.196.049 + 71.232 X$$

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh SKPD. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasikan.

**Tabel 4 Rincian Belanja Kegiatan Workshop/Diklat**

No.	Program/Kegiatan	Cost Driver		Output (OH)	Total Anggaran (Rp.)
		Orang	Hari		
1.	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	45	3	135	63.609.469
2.	Workshop Pengelolaan BPHTB	80	2	160	89.420.000
3.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	40	19	760	349.820.000
4.	Diklat Prajabatan	119	30	3570	379.849.000
5.	Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 2018	240	1	240	20.875.000
6.	Diklat Pelatihan E Commerce	40	2	80	12.280.000
7.	Diklat Pelatihan Portofolio Usaha	40	2	80	12.280.000

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2020

Suatu formula belanja/model Analisis Standar Belanja sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 60.616.589 + 100.262 X$$

Kegiatan Workshop/Diklat Teknis atau disebut juga sebagai Pendidikan dan Pelatihan Teknis merupakan suatu pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau peningkatan ketrampilan, sehingga peserta pendidikan dan pelatihan teknis mampu melaksanakan kegiatan atau tugas serta tanggung jawabnya secara professional.

#### 4. Penutup

Model yang dihasilkan berupa model prediksi pada Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan adalah  $Y = 12.516.962 + 34.054X$ , model prediksi pada Analisis Standar Belanja (ASB) untuk kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan yaitu  $Y = 13.196.049 + 71.232X$ , serta model prediksi untuk kegiatan Workshop/Diklat yaitu  $Y = 60.616.589 + 100.262X$ .

Saran dari peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu sebaiknya mengembangkan sistem Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya anggaran yang efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Kudus sebaiknya memberikan ketegasan dalam menentukan satuan waktu dan jumlah peserta yang digunakan dalam kegiatan Workshop/Diklat agar ada keseragaman sehingga dalam penyusunan Analisis Standar Belanja lebih tepat. Dasar penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) sebaiknya tidak hanya melihat waktu satu tahun saja agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanja.

#### Daftar Pustaka

- Garrison, Noreen, R. H., & Brewer, P. C. (2006). *Managerial Accounting McGraw-Hill Company*. Garrison, Noreen and Brewer Dialihbahasakan oleh Nury Hinduan. (2006). *Akuntansi Manajerial*. Edisi 11. Penerbit: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: CV. Andi Offset.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat & Rekayasa*. Edisi 3. Penerbit: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Keuangan Daerah.
- Perturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Penyusunan Anggaran Berdasarkan Prestasi Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah